



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD FAQIH
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 240037

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.982.925.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 307 m2/290 m2 di TANGERANG, WARISAN Rp. 1.102.500.000
2. Tanah Seluas 232 m2 di TANGERANG, WARISAN Rp. 435.750.000
3. Tanah Seluas 478 m2 di TANGERANG, WARISAN Rp. 444.675.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 323.065.000

1. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 247.000.000
3. MOBIL, SUZUKI JIMNY MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 46.000.000
4. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 AT/SPD.MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 28.415.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 92.400.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 10.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.398.400.000

III. HUTANG

Rp. 375.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.023.400.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDREAS HENDRA STIAWAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
3. NHK : 463569

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.057.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/50 m2 di KOTA TANGERANG SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 510.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/29 m2 di KOTA TANGERANG SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 530.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/60 m2 di BOGOR, LAINNYA Rp. 660.000.000
4. Bangunan Seluas 26 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 357.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 270.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO MANUAL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 105.200.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 11.950.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.444.150.000

III. HUTANG

Rp. 813.160.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.630.990.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASTRID NURSANTI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 235157

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	825.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/110 m2 di TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	410.000.000
1. MOBIL, HONDA CRV MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	45.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.290.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.281.290.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.281.290.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FEBRI ARIANSYAH
2. Jabatan : STAF
3. NHK : 652991

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 434 m2/60 m2 di KOTA PALEMBANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	385.000.000
1. MOBIL, HYUNDAI CRETA SUV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.400.730
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	691.400.730
III. HUTANG	Rp.	370.582.162
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	320.818.568

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KELLI SUPRIYONO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN**
3. NHK : **228830**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.356.345.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 64 m²/64 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 443.520.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m²/184 m² di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 743.820.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m²/156 m² di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 549.780.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 69 m²/69 m² di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 398.475.000
5. Tanah Seluas 454 m² di KULON PROGO, WARISAN Rp. 367.500.000
6. Tanah Seluas 150 m² di TANGERANG, WARISAN Rp. 262.500.000
7. Tanah Seluas 150 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 262.500.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 64 m²/64 m² di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 866.250.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/100 m² di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 462.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 181.900.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000



3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI		
Rp. 5.400.000		
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI		
Rp. 2.900.000		
5. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	
169.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	35.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.603.745.000
III. HUTANG	Rp.	370.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.233.745.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAHRUR
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 223954

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.924.755.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 279.510.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/21 m2 di TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 381.150.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/80 m2 di TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 693.525.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/72 m2 di TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 570.570.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 371.800.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 169.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 199.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 60.200.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 155.083.038

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.511.838.038

III. HUTANG

Rp. ---



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.511.838.038

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAKIRA UMDAH
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
3. NHK : 456032

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.293.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/150 m2 di KOTA TANGERANG , WARISAN Rp. 1.155.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/107 m2 di KOTA TANGERANG , WARISAN Rp. 1.138.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	124.000.000
1. MOBIL, SUZUKI S CROSS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 124.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	113.650.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	175.000.000
Sub Total	Rp.	2.706.150.000
III. HUTANG	Rp.	148.166.249
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.557.983.751

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.